

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Tommy Prio H. (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007-2011. Hal ini dibuktikan dengan Probabilitas *fixed effect model* diperoleh nilai Fhitung sebesar 24,92 dengan probabilitas 0,0000. Sementara itu, dengan nilai Ftabel sebesar 3,04 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Christiawan Eka, Moh. Adenan, dan Dwipayana (2015), melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Jember diperoleh nilai R^2 sebesar 0,584. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel jumlah penduduk dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 58,382%, sedangkan 41,619% dipengaruhi oleh faktor lain dan kesalahan pengganggu (*error terms*) di luar variabel jumlah penduduk dan pengangguran.

Fitrah Afrizal (2013), dengan hasil penelitian penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefisiensi sebesar 0,327. Penanaman modal asing (PMA) juga berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar 0,825. Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar 2,0124. Tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar -0,851.

B. Landasan Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat diartikan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam pentediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Dalam Perekonomian suatu Negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor lain. Sektor satu dengan sektor yang lain saling terkait baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Seperti contohnya, sektor industri memerlukan bahan mentah dari

sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industry dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada dua metode yang yaitu metode langsung dan tidak langsung :

a. Metode Langsung

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsector atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2016). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas dan air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- 1) Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestic bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor *netto*.

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal

dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

b. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain :

- Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsector pada wilayah yang dialokasikan.
- Jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya.

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi

riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (BPS, 2016).

Manfaat perhitungan nilai PDRB adalah mrngetahui struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak (Taragin,2005).

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan Kuznet.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Aliran klsaik muncul pada abad ke-18 dan awal abad 19, yaitu pada masa revolusi industry, dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

a) Adam Smith

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776), mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu Negara menurut Smith ada tiga, yaitu

1. Sumber daya alam yang tersedia(faktor produksi tanah)
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk)
3. Stok barang modal yang ada

Menurut Adam Smith untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi capital terlebih dahulu dimana akumulasi capital ini berasal dari dan tabungan. Di samping itu Smith juga menitik beratkan pada luas pasar. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional ini menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Pertumbuhan akan bersifat komulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi capital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga merupakan sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi capital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

b) David Ricardo

Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mazhab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1917.

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan, yaitu :

1. Teori tentang nilai harga dan barang
2. Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
3. Teori tentang perdagangan internasional
4. Teori tentang akumulasi pertumbuhan ekonomi

Garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu :

1. Jumlah tanah terbatas
2. Tenaga Kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah)
3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu
5. Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang kita kenal dengan istilah *The Law of Diminishing Return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah minimum, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses ini akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah minimum. Jika tingkat upah turun sampai dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Kemudian tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi, dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

Teori pertumbuhan kaum Klasik dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat perkembangan sesuatu masyarakat tergantung kepada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok alat-alat modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.

- b. Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik-pemilik tanah.
- c. Kenaikan upah akan menyebabkan pertambahan penduduk.
- d. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal, apabila tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
- e. Hukum hasil lebih yang makin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan, tanpa adanya kemajuan teknologi, pertambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, akan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah (Sukirno, 1985).

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat mewarnai teori pertumbuhan neoklasik sehingga Robert Solow dianugrahi hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1987. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan tingkat teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat

tinggi. Teori pertumbuhan neoklasik menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan Negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumberdaya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan.

Model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan jika keduanya dianalisis secara sekaligus, Solow memaknai asumsi skala hasil tetap (*constant return to scale*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Sukirno, 1985).

4. Teori Tenaga Kerja

Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembahagian pekerja di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2000).

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi penduduk memegang peranan yang penting karena menghasilkan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai akibat dari beberapa fungsinya ini maka penduduk bukan saja sebagai faktor produksi, akan tetapi yang lebih penting lagi penduduk merupakan unsur yang menciptakan dan mengembangkan teknologi, dan mengorganisasi penggunaan berbagai faktor produksi. Sejak lama telah disadari bahwa kemampuan suatu masyarakat dalam mengembangkan teknologi dan faktor-faktor produksi lainnya dengan efisien tergantung taraf kemahiran dan pengetahuan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dalam menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penduduk bukan saja harus ditelaah mengenai jumlahnya, tetapi perlu diperhatikan kualitasnya.

5. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah

bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Dalam penggunaannya, belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan (Halim, 2002). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1996).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan

publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain :

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini

termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asset, dan diatas batas minimal nilai pakai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk belanja modal ini : kontrak sewa beli (*leasehold*), pengsdssn atau pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Belanja Modal dengan PDRB

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi (Halim 2004). Belanja modal dilakukan pemerintah untuk menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli, belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nodiawan, 2006).

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasar PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2000).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tommy Prio H. (2013) dengan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengelurab pemerintah untuk belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil koefisien sebesar 0,117 terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011. Selain itu I Gede Dwi Purnama P dan I Made A (2011) juga mengadakan penelitaian yang menjelaskan bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Tenaga Kerja dengan PDRB

Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akibat dari tingkat kelahiran yang tidak dikontrol dengan baik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan

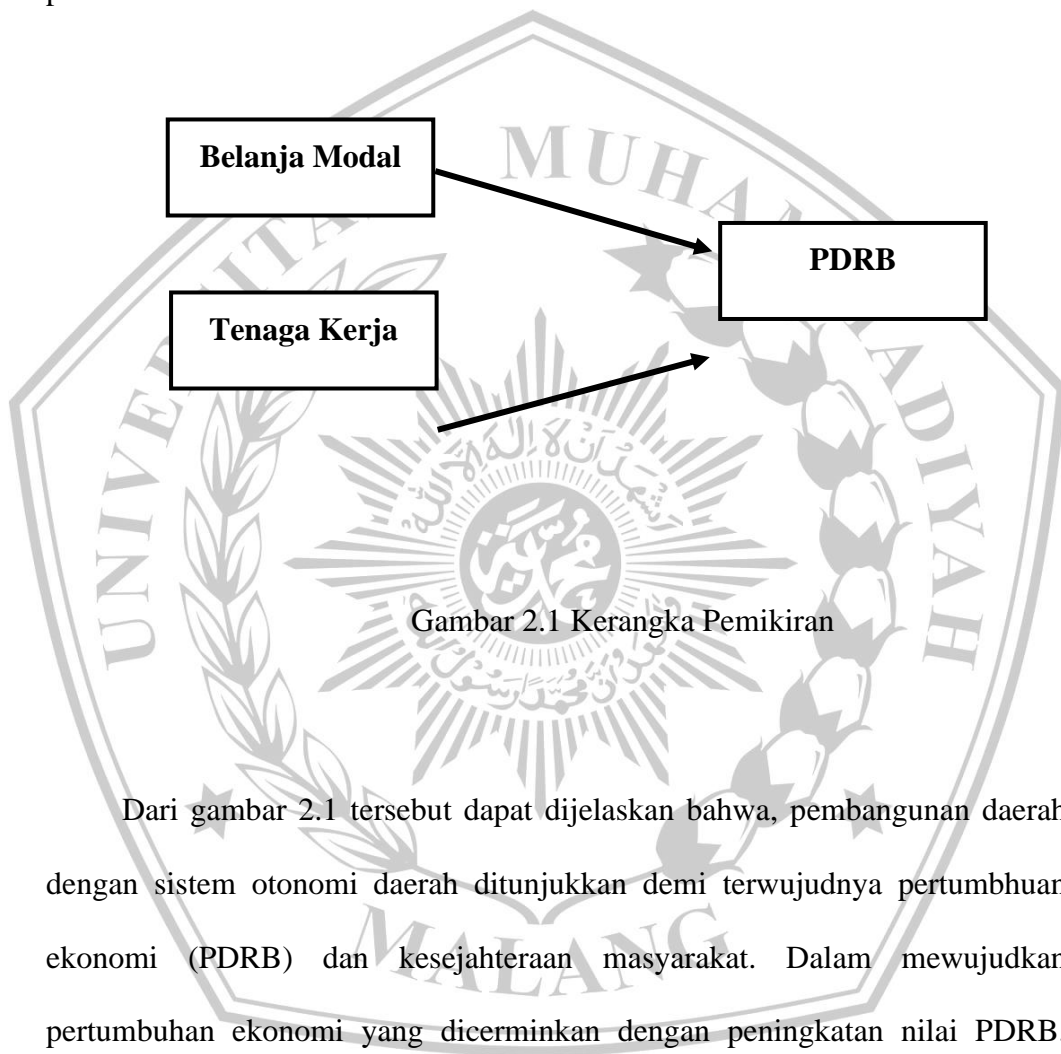
peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan banyak masalah ekonomi salah satunya adalah pengangguran. Peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat diperlukan agar tidak terjadi pengangguran dan masalah kesejahteraan lainnya. Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat mengurangi angka pengangguran yang selama ini belum dapat terpecahkan.

Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembahagian pekerja di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2000).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christiawan Eka, Moh. Adenan, dan Dwipayana (2015), dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Jember diperoleh nilai R^2 sebesar 0,584. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel jumlah penduduk dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 58,382%, sedangkan 41,619% dipengaruhi oleh faktor lain dan kesalahan pengganggu (*error terms*) di luar variabel jumlah penduduk dan pengangguran.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada gagasan dan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan menjadi sebuah kerangka pemikiran yang teoritis. Kerangka pemikiran ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa, pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditunjukkan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapainya.

Belanja modal merupakan sumber dana yang diperoleh dari pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan

daerah. Jumlah penduduk merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana pembangunan di daerah, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Kedua aspek tersebut akan menjadi pendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Dengan demikian belanja modal dan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

E. Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, perlu adanya penyampaian suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil pengujian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesis Diduga Belanja Modal dan Tenaga Kerja mempunyai pengaruh terhadap PDRB.